

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdusamad, Z. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (hlm. 45–50). Genta Publishing.
- Anwar, S., & Lubis, M. (2004). *Sendi-sendi hukum administrasi negara* (hlm. 25–32). Gelora Madani.
- Atmosudirdjo, P. (2020). *Hukum administrasi negara* (hlm. 190-195). Genta Publishing.
- Cohen, J. E. (2006). *Public opinion in state politics* (hlm. 79–85). Stanford University Press.
- Dantes, N. (2012). *Metodelogi penelitian* (hlm. 15–20). CV Andi Offset.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.) (hlm. 205–210). McGraw-Hill.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy* (hlm. 77–85). Congressional Quarterly Press.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2024). *Metodologi penelitian* (hlm. 211–220). CV Pena Persada.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art* (hlm. 115–120). Cambridge University Press.

- Hayat. (2017). *Manajemen pelayanan publik* (hlm. 17–20). Rajawali Pers.
- Lippmann, Walter., & Curtis, Michael. (2017). *Public opinion* (hlm. 202–206). Routledge.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2016). *Theories of human communication* (hlm. 90–100). Waveland press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa* (hlm. 35–40). Cakra Books.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community* (hlm. 100–105). Simon and schuster.
- Putriana, A., Kasoema, R.S., Mukhoirotin, M. D., Gandasari, A., Retnowuni, A., Aminah, R.S., Iskandar Kato, E.K.W., Akbar, M. F., Yani, A. L., & Sari, I. M. (2021). *Psikologi komunikasi* (hlm. 37–42). Yayasan Kita Menulis.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian* (hlm. 25–30). Cipta Media Nusantara.
- Ratminto, & Atik Septianti. (2005). *Pelayanan prima dalam birokrasi pemerintahan* (hlm. 12–15). Bumi Aksara.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian* (hlm. 38–43). Cipta Media Nusantara.
- Saryono. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan* (hlm. 42–45). Nuha Medika.
- Siagian, S. P. (2001). *Kiat meningkatkan produktivitas kerja* (hlm. 36–39). Rineka Cipta.
- Simbolon, P. (2004). *Manajemen Pengawasan* (hlm. 30–34). Grafiti.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (hlm. 52–54). Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D, dan penelitian pendidikan* (hlm. 45–49). Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah* (hlm. 55–57). Alfabeta.
- ZulfikahNur, U. S. U. R. (2024). *Metodologi Penelitian: Analisis Konseptual untuk Memahami Hakikat, Tujuan, Prosedur, dan Klasifikasi Penelitian* (hlm. 39–43). Nuha Medika.

Jurnal:

- Afriyana, A. (2022). Analisis persepsi aparatur sipil negara terhadap pemahaman reformasi birokrasi untuk mendukung optimalisasi kinerja. *Jurnal Agregasi*, 10(2), 98–107.
- Aslam, N. (2021). Pencegahan korupsi di sektor BUMN dalam perspektif pelayanan publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359–372.
- Bagaswara, M. A., Suharso, S., Dewi, D. A. S., & Syafingi, H. M. (2022). Implikasi perubahan undang-undang KPK terhadap independensi KPK (kajian yuridis normatif independensi dalam perspektif kelembagaan). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44.
- Irawan, R., Lubis, I., & Mansur. Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012–2022. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), 219–228.
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering digital citizenship in Indonesia: Navigating urgent digital literacy

- challenges for effective digital governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 142–155.
- Ishak, N. (2022). Efektivitas pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 71–88.
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10.
- Izzati, N. F. (2020). Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di Indonesia. *Sasi*, 26(2), 176–187.
- Kuding, I. M., & Irwansyah, I. (2020). Pemanfaatan ragam aplikasi seluler antikorupsi dalam upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 263–281.
- Liani, I. C. (2024). Analisis hukum kasus korupsi e-KTP: Modus operandi dan taktik korupsi yang terungkap. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024(2), 578–584.
- Marbela, S., Aprilya, Z., & Ulfa, K. (2023). Pentingnya prinsip etika administrasi publik dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. *Sanger: Journal Social, Administration and Government Review*, 1(1).
- Monoarfa, M. F., & Agushinta, R. D. (2022). Analisis kualitas pelayanan sistem informasi dan budaya lapor di lingkungan Ombudsman RI dengan metode SERVQUAL. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer (JNaSTek)*, 2(3), 114–125.

- Muazansyah, I. (2018). Pengaruh kemampuan kerja (work ability) dan kualitas kerja (work quality) terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 48–60.
- Nasution, I. H. (2021). Sistem pelaporan gratifikasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(8), 1356–1375.
- Nugrahani, N. M. W., Rahayu, S. M., & Azizah, D. F. (2014). Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame dalam upaya mendukung pengendalian intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–8.
- Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. *Journal of Marketing Research*, 17(4), 460–469.
- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas whistleblowing system dan sistem pengendalian gratifikasi terhadap pencegahan fraud pada sektor publik yang dimoderasi oleh pendeteksian fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105–122.
- Rozikin, M., Kusumandhari, D., Astuti, D. P., & Rahmanda, W. A. R. (2025). Upaya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan good governance: Perbandingan di negara Indonesia dan Singapura. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 5(1), 32–54.

- Sebayang, R. A. B., & Hartati, H. (2021). Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(2), 63–75.
- Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(4), 233–243.
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan good governance dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323–14334.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Tan, W. (2020). Efektivitas peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di Kota Batam. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 140–160.
- Taufiq, A., & Lukito, C. (2025). Dynamic governance melalui whistleblowing system sebagai pengendali gratifikasi di Desa Kauman. *Jurnal Niara*, 18(1), 100–113.
- Uno, H. B. (2020). Paradigma penelitian. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*.
- Utami, N. A., Suaib, E., & Purwati, N. E. (2025). Implementasi program pencegahan korupsi secara elektronik (E-Proksi) pada Inspektorat Kota

- Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 16(1), 127–135.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273–315.
- Wahyudi, A., Lie, G., Sitabuan, T. H., & Neljeane, J. (2023). Elektronifikasi permohonan persetujuan impor dalam mencegah gratifikasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1591–1602.
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah studi literatur. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310.
- Yuli Santri Isma, D. K., Muslem, M., Fadhillah, S. K., Jamiati, J., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas aksesibilitas layanan publik. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 66–77.
- Yuliyana, I., & Setyaningrum, D. (2016). Pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi di Kementerian/Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 1–26.

Skripsi

- Putri, D. A. (2025). *Inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meningkatkan akuntabilitas publik melalui pelaporan gratifikasi online di instansi pemerintah* [Skripsi, Universitas Islam 45 Bekasi]. Repository Universitas Islam 45 Bekasi.

Sulistiyarningsih. (2019). *Strategi komunikasi Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mensosialisasikan pengendalian gratifikasi* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proceeding

Windiarti, L. (2024). Tindak pidana gratifikasi yang sudah menjadi normalisasi masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 81–90.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1117>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang (2008), *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia*.

Undang-Undang (1999 jo. 2001), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang (2019), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi*

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan/Karya Ilmiah Non-Jurnal:

Dewi, S., & Widarto, W. (2024). *Literatur review transparansi dan akuntabilitas di Indonesia selama satu dekade: Studi bibliometric.*

Firmansyah, D., Nugroho, S., & Hukum, M. (n.d.). *Tinjauan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian laporan masyarakat.*

Galib Lahada. (2017). *Persepsi masyarakat terhadap pelayanan administrasi pada Kantor Lurah Uemalingku Kecamatan Ampara Kota.* 8(1).

Sughandi. (2009). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2002 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka otonomi daerah.*

Website:

Sustain.id. (2025). Indeks persepsi korupsi. <https://sustain.id/2025/indeks-persepsi-korupsi>

Ruang Informasi. (n.d.). Kinerja KPK 2020-2024. <https://ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024>

gol.kpk.go.id. Pelaporan Gratifikasi Online. <https://gol.kpk.go.id>